

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama periode 2013-2022 pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat terlihat terus merangkak naik yang juga diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah tersebut cenderung stagnan di kategori moderat. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, data hanya menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis dan kenaikan jumlah penduduk miskin yang signifikan pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang kala itu mewabah di seluruh dunia dan melumpuhkan berbagai aspek, salah satunya perekonomian.

Untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan, penelitian ini telah menggunakan analisis data panel sebanyak 27 kota/ kabupaten di Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Artinya ketika terjadi kenaikan angka pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan akan berkurang, begitu pula sebaliknya. Berbeda dengan variabel pertumbuhan ekonomi, variabel ketimpangan pendapatan justru memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan ketika ketimpangan pendapatan meningkat, maka kemiskinan juga akan ikut meningkat, begitu pula sebaliknya.

Dalam mengukur karakteristik pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat, penelitian ini menggunakan *Growth Incidence Curve*. Kurva tersebut tidak menunjukkan *downward sloping*. GIC Jawa Barat periode 2013-2022 terlihat memotong garis pertumbuhan rata-rata dari kiri bawah ke kanan atas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama 10 tahun terakhir bukan dinikmati oleh penduduk pada persentil pendapatan rendah, tetapi justru lebih banyak dirasakan oleh mereka yang memiliki pendapatan menengah dan tinggi. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat belum bersifat *pro-poor*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk pemerintah provinsi Jawa Barat:

1. Dalam mengejar angka pertumbuhan ekonomi, sebaiknya pemerintah juga turut memperhatikan redistribusi pendapatan yang terjadi agar hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata, baik oleh masyarakat miskin maupun tidak miskin.
2. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja produktif, melakukan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal, menciptakan *lifetime equality*, *equality of wealth*, dan *equality of opportunity*. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga stabilitas iklim investasi di Jawa Barat.

3. Agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata, pemerintah juga perlu fokus dalam menaikkan angka pendapatan per kapita, sehingga masyarakat dari semua kelas pendapatan bisa memiliki akses dan kesempatan yang sama.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan di antaranya meliputi:

1. Variabel yang digunakan untuk menganalisis kemiskinan hanya pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Diharapkan penelitian berikutnya dapat menambah penggunaan variabel lain yang diduga berkontribusi besar dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.
2. Penelitian ini menggunakan data panel dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat dan hanya berfokus pada periode 2013-2022. Akan tetapi, analisisnya belum mendetil hingga ke dalam masing-masing kota dan kabupatennya sehingga diharapkan penelitian di masa mendatang dapat melakukan analisis *pro-poor* dari masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Barat selama periode tertentu.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menghitung *pro-poor growth* dengan menggunakan metode analisis selain GIC, seperti PBG (*Poverty Bias of Growth*), PEGR (*Poverty Equivalent Growth Rate*), atau PPGI (*Pro-Poor Growth Index*).